

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Demokrasi

Demokrasi merupakan kata yang sering diucapkan manusia ketika berbicara tentang politik karena politik berkaitan dengan pemerintah dan rakyat. Sebagai sistem yang digunakan hampir di seluruh dunia, demokrasi menawarkan cara untuk menata suatu negara agar lebih adil dan melibatkan banyak orang. Pendekatan kuantitatif ini membuat demokrasi lebih mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan adil bagi seluruh masyarakat.

Kata demokrasi yang merupakan pemaknaan dari dua kata *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang artinya kekuasaan/kekuatan. Sejak dari perkembangan zaman Yunani kuno hingga sampai saat ini demokrasi masih tetap memiliki arti yang sama yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat serta untuk rakyat (Rasyid,2017:37).

Konsep yang pertama menurut Pericles (dalam Fatah,1994:5) mendefinisikan demokrasi dengan beberapa kriteria: 1. Pemerintahan dari rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; 2. Kesamaan didepan hukum; 3. Pluralism yaitu penghargaan atas semua bakat; 4. Penghargaan terhadap suatu pemisah dan wilayah pribadi.

Demokrasi ada dua kelompok aliran yang sangat penting yaitu demokrasi konstitusional dan kelompok aliran yang mengatasnamakan dirinya demokrasi akan tetapi pada dasarnya kelompok ini mendasarkan pada komunisme.

Demokrasi yang dipakai Indonesia adalah demokrasi berlandaskan Pancasila, demokrasi ini masih dalam proses perkembangan mengenai sifat dan cirinya yang masih terdapat penafsiran dan pandangan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa nilai pokok dari demokrasi konstitusional yang cukup jelas tersirat pada undang-undang dasar 1945 yang belum diamandemen yaitu mengenai sistem pemerintahan negara:

1. Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, tidak berasaskan kekuasaan.
2. Sistem konstitusional, pemerintah berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme.

Demokrasi konstitusional mempunyai ciri khas yakni gagasan pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya serta tidak bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli Inggris “Lord Acton” dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu dilaksanakan oleh manusia, manusia tanpa terkecuali banyak terdapat kelemahan. Kekuatan “Lord Acton” dalam menyatakan hal seperti itu adalah “manusia yang memiliki kekuasaan cenderung akan menyalahgunakan kekuasaan itu, akan tetapi manusia yang memiliki kekuasaan tak terbatas maka akan menyalahgunakan tak terbatas pula (Budiardjo,2008:107).

Dalam pandangan klasik demokrasi dimaknai dengan upaya wujud pemerintahan yang berlangsung dilaksanakan oleh khalayak ramai “*rule by the many*” yang dapat kita pahami bahwa bentuk pemerintahan dijalankan oleh rakyat

“rule by the people” (Cangara,2016:53). Demokrasi ini difokuskan akan dua hal yang sangat penting dan saling memiliki keterkaitan yakni representasi (perwakilan) dan partisipasi. Pertama ditujukan pada pertimbangan kepentingan mayoritas atau khalayak ramai, dan yang kedua ditujukan pada keinginan dan keikutsertaan publik pada aktivitas politik. Hal ini juga sepemikiran dengan Abraham Lincoln dalam sebuah pidatonya *“democracy mean the rule of the people”* yang mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat serta untuk rakyat (Cangara,2016:53). Dalam pemikiran barat demokrasi merupakan suatu sistem politik yang dilihat bukan saja pemilihan bebas, jujur akan tetapi pemisahan kewenangan kekuasaan (eksekutif, yudikatif dan legislatif) serta pelaksana kekuasaan diatur oleh hukum, melindungi kebebasan berkumpul, berbicara, beragama dan hak-hak pribadi seseorang (Huntington, dalam Cangara,2016:53).

Demokrasi memiliki arti penting bagi orang-orang yang menggunakan karena dengan demokrasi hak rakyat untuk menentukan menjalankan sendiri organisasi negara. Oleh karena itu, hampir semua artinya Mengingat istilah demokrasi, selalu memberikan posisi penting untuk masyarakat meskipun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara memberikan pengertian bahwa dalam tingkat terakhir dari orang-orang memberikan ketentuan tentang masalah utama yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan ini menentukan kehidupan rakyat (Noer,1983:207). Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika dilihat dari sudut organisasi berarti organisasi negara yang dilakukan oleh rakyat

sendiri atau dengan persetujuan rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat (Mahfud Md,2003:19)

Hendry B. Mayo (Budiardjo,2008:117) memberikan definisi demokrasi sebagai berikut. “Sistem politik yang demokratis adalah sistem yang kebijakan publiknya dibuat atas dasar mayoritas, oleh perwakilan yang tunduk pada kontrol rakyat yang efektif pada pemilihan berkala yang dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan politik dan di bawah kondisi kebebasan politik”. Berdasarkan pendapat ini demokrasi tidak hanya dianggap sebagai suatu sistem pemerintahan tetapi juga suatu gaya hidup masyarakat dan tata masyarakat tertentu yang mengandung unsur moral. Hal ini dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai yang menurut Henry B. Mayo (Budiardjo,2008:118) ada enam nilai diantaranya sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselengranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Pandangan Joseph Schumpeter dapat diartikan dalam dua pengertian. Pertama, demokrasi sebagai kehendak rakyat. Tentu saja, demokrasi akan terwujud manakala kehendak mayoritas rakyat dapat dipenuhi oleh pemerintah yang berkuasa dengan baik. Kedua, demokrasi sebagai kebaikan bersama Merujuk

pada ide awal pembentukan negara, dikatakan bahwa kemaslahatan bersama adalah akhir dari kehendak kolektif warga negara (Hadiwijoyo, 2012:33). Oleh karena itu, tujuan dari sistem pemerintahan yang demokratis adalah untuk menciptakan kesejahteraan bersama yang tertuang dalam kontrak politik.

Demokrasi juga tidak hanya menyangkut pelebagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, tetapi juga merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang beragam dan plural, dengan saling menghormati satu sama lain (Irmansyah,2011:117). Oleh karena itu, perwujudan demokrasi harus diatur berdasarkan undang-undang. Perwujudan dan gagasan demokrasi memerlukan perangkat hukum, efektifitas dan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta landasan kesejahteraan ekonomi yang berkembang secara merata dan berkeadilan. Jelas bahwa ada banyak bentuk demokrasi dan memiliki kualitas dan tingkatan yang berbeda. Apapun format demokrasinya, jika semua warga negara berpartisipasi dengan baik dan selalu amanah, maka roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

2.2 Konsep Pemilihan Umum

Dalam setiap negara yang menganut sistem demokrasi pasti tidak akan terlepas dengan apa yang namanya pemilu, karena pemilu merupakan sebuah lambang sekaligus menjadi tolak ukur sebuah negara demokrasi. Output dari pelaksanaan sistem pemilu yang dilaksanakan dengan keterbukaan dan kebebasan berpendapat berserikat ini mencerminkan dengan akurat perilaku partisipasi dan aspirasi dari rakyat. Meskipun demikian bahwa disadari pemilu bukan merupakan

satu-satunya tolak ukur yang perlu dilengkapi dengan ukuran kegiatan lain yang memiliki sifat berkesinambungan, seperti kegiatan partai atau lobbying dan lain sebagainya (Budiardjo,2008:461).

Pemilu banyak memiliki arti semisal seperti pengertian yang disampaikan oleh Harmaili Ibrahim (dalam Efriza,2019:213) mendefinisikan pemilu sebagai suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di legislatif. Sementara menurut R. William Liddle (dalam Rasyid,2017:160) menyatakan:

“Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pemilu sering dipandang sebagai penghubung antara prinsip-prinsip kedaulatan politik. Setiap warga negara yang dianggap dewasa dapat memilih wakilnya di parlemen, termasuk pemimpin pemerintahan. Keputusan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat diberikan dengan seperangkat jaminan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.”

Dalam pandangan ilmu politik kita dapat mengetahui berbagai jenis sistem pemilu dengan berbagai macam modelnya, akan tetapi yang paling umum biasanya mengikat dua yakni pertama *single-member constituency* (satu wilayah daerah pemilihan memilih satu wakil atau kita kenal dengan sistem distrik) kedua *multi-member constituency* (satu wilayah daerah pemilihan memilih beberapa wakil atau yang kita kenal dengan sistem berimbang/proporsional) (Budiardjo dalam Rasyid,2017:161). Sistem distrik adalah sebuah sistem pemilu yang paling tua serta didasarkan pada kesatuan geografis. Hal ini dikarenakan sistem distrik menjadi tubuh dari suatu wilayah, satu wilayah berhak atas satu kursi saja, kontestan politik yang mempunyai suara tertinggi yang akan menjadi pemenang hal ini dinamakan *the first past the post* (FPTP). Dalam sistem pemilu

proporsional satu daerah/wilayah dikategorikan sebagai kesatuan serta dalam wilayah tersebut jumlah kursi dibagi berdasarkan jumlah suara yang berhasil diperoleh oleh setiap kontestan politik secara menyeluruh.

Pemilihan umum atau yang kita kenal dengan pemilu merupakan sarana/alat yang tersedia bagi rakyat guna menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Di Indonesia pemilihan umum ialah sebuah keniscayaan, dimana dalam pemilu semua aspirasi masyarakat dimungkinkan berjalan secara demokrasi. Pada saat pemilulah, rakyat sebagai pemilih akan bisa menilai dan melihat para kontestan politik dapat menjual visi serta misi dan program kandidat, sehingga dengan begitu rakyat akan tahu kemana arah perjalanan negaranya. Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah pelaksana kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

2.3 Konsep Badan Legislatif

Setiap warga negara dalam membicarakan, bersikap, serta berperilaku tidak akan terlepas dari aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Aturan tersebut tertuang pada undang-undang dasar, PERPU, dan PERDA bagi semua pelaksanaan bidang kehidupan, politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam (Anggara, 2013:173).

Badan legislatif atau *legislature* menggambarkan salah satu fungsi badan yaitu *legislate* atau merancang undang-undang. Nama lain yang seringkali di

samakan ialah *assembly* yang mengedepankan “berkumpul” guna membicarakan masalah-masalah publik atau kepentingan umum. Sebutan lain adalah *parliament* yakni “berbicara” atau merundingkan, sebutan lain mengedepankan representasi dan keterwakilan anggota yang kita kenal dengan dewan perwakilan rakyat, ini semua merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat (Budiardjo,2008:315).

Berdasarkan teori yang berkembang “rakyatlah yang berdaulat” yakni kehendak rakyat. (yang oleh Rousseau dinamakan *volonte generale* atau *general will*) keputusan yang diambil badan legislatif berdasarkan suara terbanyak dari rakyat (Budiardjo,2008:315). Dengan perkembangan ide bahwa kedaulatan berada pada tangan rakyat maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menjalankan kedaulatan tersebut dengan cara menentukan kebijakan umum serta menuangkannya dalam perancangan undang-undang, pada hal ini badan eksekutif hanya menjalankan kebijakan umum yang telah dibuat oleh badan legislatif.

Rousseau merupakan pelopor dari gagasan kedaulatan rakyat kurang menyetujui timbulnya badan perwakilan, akan tetapi Rousseau memimpikan suatu bentuk demokrasi langsung seperti yang ada di Jenewa selagi masa hidupnya. Hal ini dimana rakyat akan secara langsung merundingkan dan memutuskan soal-soal kenegaraan dan politik. Namun saat ini demokrasi langsung seperti apa yang diinginkan Rousseau dianggap kurang praktis dan hanya dipertahankan dalam bentuk khusus dan terbatas. Dapat dikatakan dalam negara yang modern saat ini rakyat memilih wakil-wakil guna menyelenggarakan kebijakan umum melalui pemilu secara berkala (Anggara,2013:174).

Badan legislatif dalam negara yang demokrasi dirancang sebagai mungkin supaya mereka mewakili suara mayoritas dan bertanggung jawab pada rakyat. Guna menggambarkan perumusan C.F Srtong yang menggabungkan tiga unsur dari sebuah negara demokrasi yaitu representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik: "Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakannya kepada mayoritas itu" (Budiardjo,2008:316).

Sebuah negara yang menyebut dirinya demokrasi peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai memiliki kekuasaan tertinggi untuk merumuskan undang-undang dan disebut "Legislatif". Legislatif adalah yang paling penting dalam struktur negara karena hukum itu seperti tiang yang menegakkan kehidupan perumahan Negara dan sebagai alat untuk menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara. Sebagai tubuh legislator, legislatif hanya berhak untuk hanya membuat undang-undang, tidak bisa menerapkannya. Untuk menerapkan hukum, itu harus diserahkan kepada tubuh lain.

Badan legislatif (Budiardjo,2008:322) memiliki dua fungsi penting diantaranya sebagai berikut:

1. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang.

Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk

mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, terutama dalam bidang anggaran.

2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas ini badan legislatif diberi hak-hak kontrol khusus.

2.4 Komunikasi Politik

a. Pemahaman Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan ungkapan yang terdiri dari dua kata yaitu “komunikasi” dan “politik” yang memiliki arti dan makna tersendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah menggabungkan dua kata menjadi arti yang lebih luas, seperti yang dijelaskan oleh para ahli. Komunikasi politik menurut Mc Nair yang dikutip oleh Hafied Cangara murni berbicara tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, baik itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan kekuasaan dan keputusan dalam membuat undang-undang atau peraturan, baik itu itu legislatif, eksekutif, serta sanksi baik berupa hadiah maupun denda (Cangara,2016:29).

Komunikasi politik kemudian digunakan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan politik suatu negara untuk menjalin hubungan dengan orang lain, kelompok tertentu, atau orang dalam konteks yang lebih luas. Sehingga proses pencapaian tujuan komunikator tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya. Dalam kondisi seperti itu, biasanya saluran komunikasi yang digunakan adalah melalui media massa, baik berupa rapat umum, konferensi pers, dan lain-lain.

b. Komunikator Politik

Berbicara tentang masalah politik tentunya tidak hanya membahas permasalahannya saja, tetapi kita harus mengetahui siapa aktor ideal yang disebut komunikator politik dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Komunikator politik adalah orang atau kelompok orang yang menyampaikan pesan politik yang biasanya berkaitan dengan kekuasaan pemerintah, kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, otoritas pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak, baik secara verbal maupun nonverbal (Cangara,2016:31)

c. Pesan Politik

Pesan politik merupakan salah satu elemen penting dalam komunikasi politik. Pada hakikatnya pesan adalah suatu informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk menemukan kesamaan makna atau persepsi. Karena pada dasarnya, pesan biasanya berisi ide atau gagasan manusia untuk disampaikan bahkan untuk didiskusikan dengan manusia lain, yang membuat seseorang dikategorikan sebagai komunikator politik adalah isi pesan yang disampaikannya yang berhubungan dengan politik. Secara sederhana, kegiatan politik adalah kegiatan yang melibatkan kekuasaan, pengaruh, dan wewenang oleh manusia. Jadi, pesan politik adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam usahanya untuk; a) mencapai, mempertahankan, dan memperbesar kekuasaan. b) mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan keinginan komunikator. c) menunjukkan atau menunjukkan kekuasaan.

d. Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik

Komunikasi politik mempunyai beberapa tujuan penting, antara lain membentuk citra politik yang baik di masyarakat, menciptakan opini publik dan ikut serta dalam pemilihan umum serta mempengaruhi kebijakan publik dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat (Arifin,2011:125). Ada berbagai bentuk komunikasi politik, tetapi bentuk yang umum digunakan oleh politisi adalah:

1. Retorika politik berasal dari bahasa Yunani *rhetorica* yang berarti seni berbicara. Awalnya digunakan dalam debat di ruang sidang untuk saling mempengaruhi sehingga menjadi aktivitas antar pesona. Kemudian berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa, yaitu berpidato kepada banyak orang (*audiens*) (Arifin,2011:126).
2. Agitasi politik Berasal dari kata latin *agitare* yang berarti menggerakkan atau dalam bahasa Inggris *agitation*. Menurut Harbert Blumer sebagaimana dikutip Anwar Arifin, agitasi dilakukan untuk menggugah masyarakat agar melakukan gerakan politik, baik secara lisan maupun tulisan, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak (Arifin,2011:131). Dimulai dengan bagaimana menciptakan kontradiksi di masyarakat, kemudian menggerakkan penonton untuk menentang realitas kehidupan yang dialami selama ini (penuh ketidakpastian dan penuh penderitaan) dengan tujuan menimbulkan keresahan di kalangan massa.
3. Propaganda Politik, Propaganda merupakan suatu bentuk kegiatan yang sudah ada sejak lama di bidang politik. Penggunaan propaganda politik secara intensif dalam politik dilakukan oleh Hitler (Nazi) dalam Perang

Dunia II. Yaitu dengan berbohong dengan menyebarkan ideologi Nazisme (fasisme) untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Di negara yang menganut sistem demokrasi menurut Leonardo W. Dobb dapat dipahami sebagai usaha individu atau kelompok yang berkepentingan guna mengontrol sikap kelompok individu lain dengan jalan menggunakan sugesti. Sedangkan menurut Herbert Blumer menyampaikan pendapatnya bahwa propaganda adalah suatu kampanye politik yang di sengaja mengajak atau merangkul untuk memberikan pengaruh orang agar dapat menerima suatu pandangan, sentiment, dan nilai (Arifin,2011:133).

4. Kampanye politik adalah bentuk kampanye komunikasi yang paling menarik dan semarak ini dilakukan menjelang hari pemilihan kampanye politik. Kampanye politik mencakup suatu bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang pada waktu tertentu untuk mendapatkan dukungan politik dari rakyat. Kampanye politik adalah penciptaan kembali, dan transfer simbol-simbol penting secara terus menerus melalui komunikasi. Istilah kampanye berasal dari Bahasa Inggris yakni *campaign*, secara umum kampanye juga dimaknai dengan kegiatan komunikasi verbal dan nonverbal secara persuasif. Roger dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian kegiatan komunikasi lintas organisasi dengan maksud dan tujuan tertentu agar dapat memberikan pengaruh serta dampak. Leslie B. Synder juga menyampaikan pendapat bahwa kampanye adalah aktivitas komunikasi yang terstruktur secara langsung

ditujukan kepada khalayak tertentu, serta pada periode tertentu yang sudah ditentukan guna mencapai sebuah tujuan (Arifin,2011:153).

2.5 Strategi Komunikasi Politik

Strategi merupakan sebuah langkah utama dalam politik serta memerlukan penanganan secara hati-hati dalam berkampanye. Karena ketika dalam praktek strategi politik ada sesuatu tindakan yang salah atau tidak tepat maka akan mendapat hasil yang tidak diinginkan. Terutama kerugian dari segi tenaga, materi dan waktu. Oleh dari itu strategi merupakan cara atau metode yang mesti disembunyikan oleh para ahli kampanye politik. Strategi adalah sebuah konsep militer yang juga dapat kita artikan sebagai seni ataupun alat perang para jendral (The Art Of General), atau suatu perencanaan yang terbaik guna memenangkan peperangan. Menurut Marthin dan Arderson (dalam Cangara,2016:252), menjelaskan strategi sebagai seni karena melibatkan kemampuan intelegensi/pikiran untuk menyatukan seluruh sumber daya yang ada dalam mewujudkan tujuan dengan mendapatkan keuntungan yang maksimal dan efisien.

Strategi komunikasi yang dijelaskan oleh Roger (dalam Cangara,2016:252), ialah memberikan batasan arti sebagai sebuah rancangan yang dirancang untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam ruang lingkup yang lebih besar melalui pemahaman ide-ide baru. Strategi komunikasi adalah gabungan perencanaan komunikasi (communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication managemen) guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditargetkan. Strategi komunikasi diharapkan mampu menonjolkan bagaimana

operasionalnya secara praktis harus dilaksanakan, dalam arti kata pendekatannya dapat berbeda tergantung dalam suatu kondisi dan situasi yang dilaluinya. Strategi komunikasi yang direncanakan oleh tim ahli kampanye mesti direncanakan secara benar dan luwes, sehingga cara operasionalnya dapat disesuaikan dengan faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan strategi secara efektif dan efisien, seorang pelaksana strategi komunikasi mesti paham karakteristik dari audiennya, dan apa pesan yang ingin disampaikan sehingga bisa menentukan jenis media serta teknik apa saja yang akan diterapkan untuk berkampanye politik.

Strategi komunikasi politik merupakan sebuah taktik yang memiliki pengaruh untuk partai ataupun calon kandidat dalam sebuah pemilihan umum. Keterlibatan strategi komunikasi politik merupakan bentuk kontribusi yang besar dalam menggunakan dan merencanakan strategi calon kandidat atau partai politik untuk menyusun yang tidak hanya dalam menghadapi pemilu namun juga dalam pasca pemilu. Komunikasi politik dapat diartikan sebuah mekanisme penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

Politik dan strategi adalah dua hal yang mesti berjalan seiringan dalam mencapai tujuan perpolitikan dan kemenangan pemilu atau pileg. Dengan tidak adanya strategi komunikasi politik, suatu rencana, metode dan cara yang disiapkan oleh ahli kampanye politik akan memperoleh hasil diluar tujuan bilamana tidak direncanakan dengan matang dan luwes. Strategi komunikasi politik sangat membantu bagi para pasangan calon atau perorangan yang

mempunyai keinginan untuk mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat dalam suatu konteks pemilihan umum demi tercapainya tujuan politik. Apabila komunikator atau ahli kampanye dapat mempengaruhi hati masyarakat, maka percayalah kemenangan pasti akan diperoleh oleh para calon kandidat pasangan atau perseorangan tersebut.

Pendapat lain oleh Arifin (2011:235) dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi Politik”, strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan bersyarat tentang tindakan yang akan dilakukan sekarang untuk mencapai tujuan politik di masa depan.

1. Ketokohan dan Kelembagaan

- a) Peduli Karakter. Tokoh dalam politik diperoleh karena kredibilitas, yaitu dapat dipercaya karena akhlak dan moral yang terpuji dalam bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Kepercayaan tumbuh karena keahlian atau kemampuan dan kemahiran mereka dalam menyampaikan substansi pesan yang mereka kuasai. Keahlian diperoleh dalam jangka waktu yang lama melalui proses pembelajaran atau pendidikan formal atau informal.
- b) Penguatan Kelembagaan Citra diri partai politik merupakan sesuatu yang diyakini dan diharapkan oleh masyarakat tentang apapun yang dilakukannya. Partai politik harus solid dan harmonis dalam memainkan peran sebagai mediator dan penerjemah kegiatan politik kepada publik.

2) Menciptakan kebersamaan

Menciptakan kebersamaan memiliki tujuan agar politisi dan khalayak mengenal khalayaknya dengan menyusun pesan-pesan homofilik. Salah satu

contohnya adalah dengan menciptakan kesamaan bahasa (simbol komunikasi), pakaian, kepentingan mengenai pesan politik dan media politik. Ini termasuk komunikasi untuk menciptakan kebersamaan.

- a) Memahami Khalayak: Memahami budaya, agama, dan ideologi di masing-masing daerah. Menurut Lasswell (dalam Arifin, 2011: 114), ada tiga bentuk pengaruh kelompok, yaitu (1) area perhatian adalah bidang perhatian individu yang identik dengan komunitas, (2) area publik adalah bidang yang memiliki pengaruh pada seseorang karena keterikatan psikologis yang kuat antar individu dan kelompok, dan (3) wilayah sentimen adalah sesuatu yang ada dalam diri seseorang dimana terdapat ikatan yang sangat sulit untuk dijelaskan dan hanya dirasakan kebenarannya.
- b) Kembangkan Pesan Persuasif. Pesan yang harus disampaikan oleh audiens harus sesuai dengan kondisi karakteristik audiens. Syarat menyusun pesan politik persuasif adalah menentukan tema dan materi yang sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak. Pesan juga harus mampu membangkitkan perhatian.
- c) Penentuan Metode. Pemilihan metode dan media harus disesuaikan dengan bentuk pesan, keadaan khalayak, fasilitas, dan biaya. Menurut Arifin (2011: 72-73) metode komunikasi yang dapat dipilih adalah: 1) pengulangan pesan politik (redundancy), 2) meneliti pengaruh kelompok terhadap individu (canalizing), 3) pesan yang mengandung fakta

(informatif), 4) membujuk (persuasive), 5) pesan yang berisi opini, fakta, pengalaman (edukatif), dan 6) koersif.

- d) Pemilihan Media. Penggunaan media (tunggal) atau media (jamak) perlu dipilah dan dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak. Media itu sendiri terdiri dari (media visual) seperti koran, majalah, poster, dan spanduk. Media (media auditif) seperti radio, telepon, sirine. Media (media audio visual) seperti film dan televisi serta media interaktif melalui jaringan komputer (internet).

3) Membangun Konsensus

- a) Seni Berkompromi. Seorang politisi harus memiliki kemampuan untuk berkompromi. Seni kompromi ini umumnya merupakan bakat atau skill bawaan yang dimiliki oleh para politisi. Seni membangun konsensus juga akan membuat seorang politisi tidak boleh berpikir “hitam-putih”, matematis, dan normatif tetapi harus membuka peluang untuk berkompromi atau membangun konsensus.
- b) Bersedia Terbuka. Politisi dalam membangun konsensus harus terbuka, yaitu menerima pengalaman baru atau ide baru, sesuai dengan konsep diri yang ada pada setiap politisi yang berbeda pendapat.

2.6 Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan berfungsi untuk menjadi literatur tentang posisi masalah yang akan diteliti di antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian lain sehingga tidak terjadi duplikasi (plagiarisme). Oleh

karena itu, penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal berjudul “Strategi Komunikasi Politik Dedi Humadi Dalam Pemilihan Umum Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014. Yang ditulis oleh Arief Triawang jurnal ini memaparkan Strategi komunikasi politik yang digunakan Dedi Humadi adalah berkomunikasi secara terus menerus atau menjaga hubungan dengan masyarakat yang telah memilihnya pada pemilihan umum legislatif sebelumnya. Masalah ini Menurut Adman Nursal dalam Toni Andrianus Pito (2006:210) dapat dilakukan dengan memperhatikan dan kinerja seorang kontestan (calon atau partai politik), dengan tetap mempertahankan atau mempertahankan pemilih dan orang-orang yang setia kepadanya. dengan tujuan untuk bisa menang dalam pemilihan umum legislatif periode berikutnya.
2. Skripsi berjudul “Strategi Komunikasi Politik Untuk Anggota dewan dapil 5 PDI-P Dalam Pemilu Di Kabupaten Nagwi Tahun 2019” yang tulis oleh Alwins Muflikhatun Nahriyati Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan terhadap fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan metode yang ada. Sumber data primer meliputi hasil wawancara dengan narasumber, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari arsip dan dokumen pribadi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data adalah dengan melakukan

triangulasi data dengan data kemudian membandingkannya dengan sumber lain, atau metode yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Strategi komunikasi politik yang digunakan oleh anggota legislatif ini adalah dengan membangun citra yang baik di masyarakat, memberikan bantuan finansial dan non finansial, dan mewujudkan aspirasi masyarakat.

3. Skripsi berjudul “strategi komunikasi politik Martinus Khiu dalam meraih dukungan masyarakat pada pemilu legislatif tahun 2019 di daerah pemilihan Bengkayang 1 Kabupaten Bengkayang” yang ditulis oleh Iska Ringosari skripsi ini mengungkap bagaimana strategi yang digunakan oleh Mertinus Khiu dalam memperoleh suara masyarakat. Penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data atau penyajian data tahap kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik yang digunakan martinus khiu dapat ditinjau dari teori strategi komunikasi politik oleh suwandi (2002) terdapat enam elemen perencanaan yang biasa digunakan dalam pemilu yaitu goal dan obyektif, public, strategik, taktik, anggaran dan waktu serta evaluasi. dari enam elemen tersebut promosi dan kegiatan merupakan aspek yang paling dominan karena berkaitan dengan figure martinus khiu mengenalkan kepada masyarakat sehingga itu semua mengantarkan martinus khiu untuk menang di pemilihan legislative bengayang 1 kabupaten bengayang.

4. skripsi berjudul “strategi komunikasi politik Sukaryadi dalam pemilihan Kepala Desa Tebang Kacang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015” yang ditulis oleh Khoirus Sholeh skripsi ini bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis strategi komunikasi politik Sukaryadi dalam pemilihan kepala desa tebang kacang. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. dengan teori Arifin Anwar ketokohan dan kelembagaan, menciptakan kebersamaan dengan khalayak, dan membangun konsensus. hasil dari penelitian ini bahwa dalam membangun ketokohan dan kelembagaan Sukaryadi menjadikan tokoh sebagai tim pemenangan. menciptakan kebersamaan dilakukan sukaryadi agar mendapat daya Tarik dari masyarakat serta membangun konsensus yang dilakukan Sukaryadi dan tim dengan membuat visi misi yang jelas dalam mendukung perkembangan masyarakat tebang kacang.

Dari beberapa pemaparan penelitian terdahulu diatas Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tema yang sama membahas strategi komunikasi politik, metode penelitian yang sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, serta membahas strategi yang digunakan oleh objek saat pemilu. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam hal rumusan masalah, judul penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, dan sistematika penulisan.

2.7 Alur Pikir Penelitian

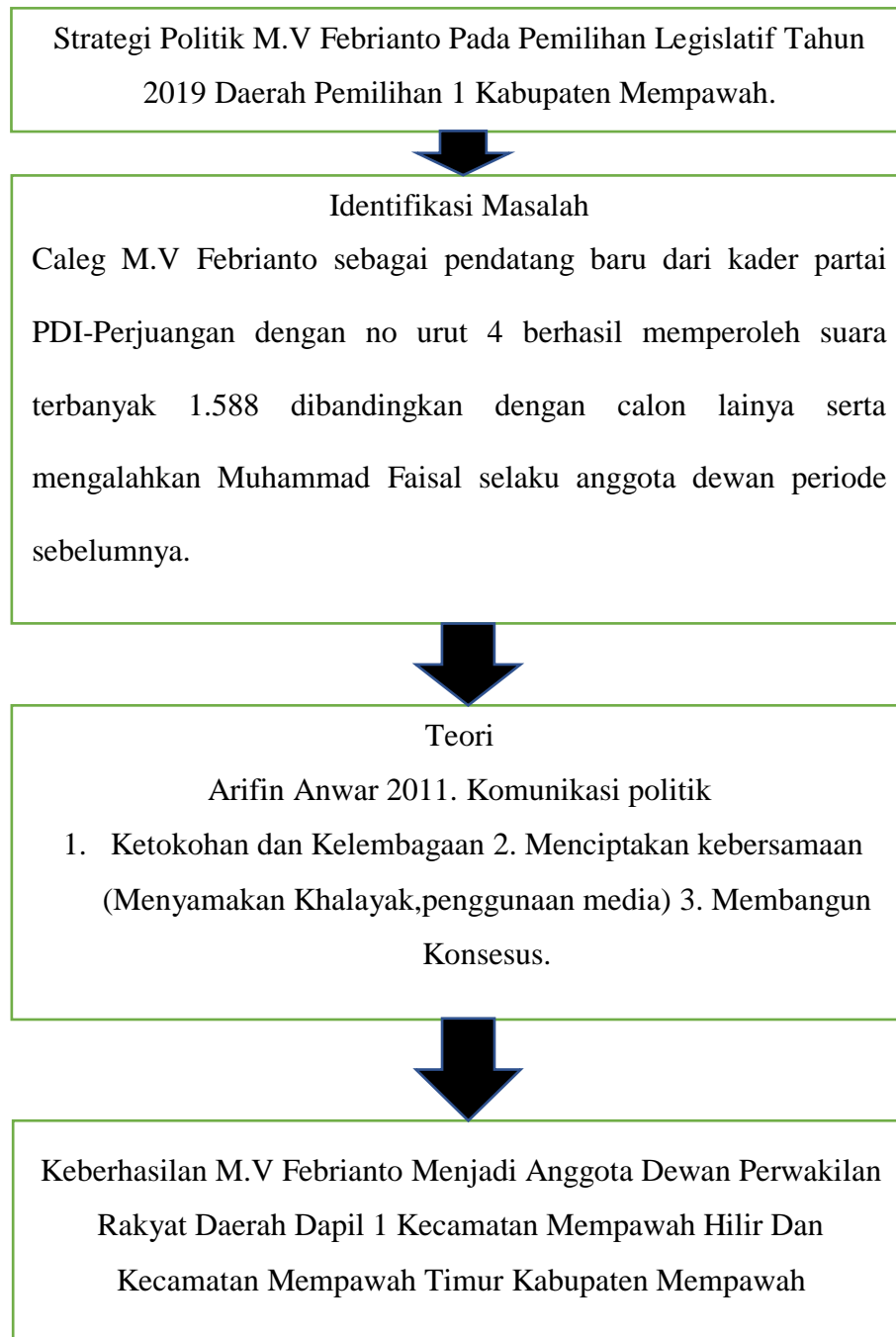
Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi inti dari penelitian ini. Dari fenomena yang ada yaitu; Judul dari

penelitian ini adalah Strategi Politik M.V Febrianto Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Mempawah. Identifikasi masalah yaitu Caleg M.V Febrianto sebagai pendatang baru dari kader partai PDI-Perjuangan dengan no urut 4 berhasil memperoleh suara terbanyak 1.588 dibandingkan dengan calon lainya serta mengalahkan Muhammad Faisal selaku anggota dewan periode sebelumnya. Dan Caleg M.V Febrianto diusung oleh PDI-Perjuangan menang pada dapil yang mayoritas pemilihnya beragama muslim.

Dari identifikasi masalah tersebut, maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Strategi Komunikasi Politik M.V Febrianto Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Mempawah. Untuk meneliti permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori dari Arifin Anwar 2011, komunikasi politik Ketokohan dan Kelembagaan •Menciptakan kebersamaan (Menyamakan Khalayak, penggunaan media) •Membangun Konsesus. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mengetahui Bagaimana Strategi Komunikasi Politik M.V Febrianto Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Mempawah.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



2.8 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana M.V Febrianto membangun ketokohan dan kelembagan dalam pemilihan legislatif 2019 ?
2. Bagaimana M.V Febrianto menciptakan kebersamaan dalam pemilihan legislatif 2019 ?
3. Bagaimana M.V Febrianto membangun konsensus dalam pemilihan legislatif 2019 ?